

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA SUNGAI TAMBORAS DI DESA TAMBORAS KECAMATAN IWOIMENDA KABUPATEN KOLAKA

Rijal¹, Rani Maswati², Darlin³

Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, YAPIS Biak, Indonesia^{1,2,3}

E-mail: rijalbudiman020390@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Objek Wisata Sungai Tamborasi di Desa Tamborasi Kecamatan Iwoimenda Kabupaten Kolaka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan tipe penelitian Studi Kasus. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, interview, studi kepustakaan dan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Objek Wisata Sungai Tamborasi di Desa Tamborasi Kecamatan Iwoimenda Kabupaten Kolaka belum Maksimal. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dari informan mengatakan bahwa peran pemerintah sebagai Fasilitator dalam pengelolaan objek wisata belum bekerja dengan baik. Pemerintah sebagai Motivator belum maksimal karena tidak adanya pelatihan dan pendidikan mengenai objek wisata, dan Pemerintah sebagai Regulator dilihat masih belum maksimal dalam menerapkan peraturan mengenai objek wisata dan pemerintah tidak melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap pengelolaan objek wisata Sungai Tamborasi Kabupaten Kolaka.

Kata Kunci: *Peran, Pemerintah Daerah, Pengelolaan, dan Objek Wisata*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang sangat indah dan memiliki banyak sumber daya pariwisata yang tidak kalah menarik bila di bandingkan dengan Negara lain di kawasan ASEAN. Namun demikian kepemilikan kelebihan sumber daya tersebut perlu suatu upaya yang lebih terarah. Agar sumber daya tersebut mampu memiliki daya saing dalam menarik kunjungan wisatawan. Dalam pembangunan pariwisata, objek wisata

merupakan sasaran utama, mereka adalah penyebab utama motivasi wisatawan mengunjungi tempat wisata. Sebagaimana dijelaskan oleh (Yoeti, 2008, p. 185) Objek wisata merupakan segala sesuatu yang menjadi daya tarik bagi orang untuk suatu daerah tertentu. Alasan lain karena dalam pengembangannya perlu terfokus secara terpadu. Misalnya, daya tarik wisata ingin berhasil menjadi tempat kunjungan wisatawan, hendaklah pembangunannya terpadu dengan

sarana dan prasarana yang berhubungan dengan transportasi, akomodasi, dan keamanan.

Sejumlah pengamat memperkirakan dalam periode 2014 hingga 2019 bakal banyak wisatawan asing yang datang ke Asia Pasifik. Sebagai Negara yang direkomendasikan untuk dikunjungi adalah Indonesia. Hal tersebut dijelaskan berdasarkan Survei Pacific Asia Travel Association (PATA) *Asia Pasific*. Sementara itu Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2016), selama Januari - Desember 2016 jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia mencapai 11.519.275 orang. Naiknya jumlah wisatawan mancanegara itu menjadikan Indonesia aman untuk dikunjungi. Industri pariwisata sebagai penyumbang devisa terbesar ketiga dalam negeri. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Pariwisata adalah adanya berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan yang dapat diketahui bahwa pariwisata bertujuan untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa

memupuk rasa cinta tanah air, mempekuh jati diri dan kesatuan dalam bangsa dan mempererat persahabatan antar bangsa. Sulawesi Tenggara adalah sebuah provinsi yang terletak di Jazirah Tenggara Pulau Sulawesi yang terletak di antara 120°45' - 124°30' Bujur Timur dengan wilayah daratan seluas 38.140 km² atau 3.814.000 ha dan wilayah perairan (laut) seluas 110.000 km² atau 11.000.000 ha. Di Sulawesi Tenggara terdapat banyak kawasan wisata alam yang tersebar di seluruh wilayahnya.

Kabupaten Kolaka memiliki beberapa kawasan wisata alam salah satunya adalah Sungai Tamborasi dimana objek wisata ini diberi nama permandian Tamborasi oleh masyarakat setempat karena dinilai memiliki keunikan tersendiri yakni dengan adanya sebutan sungai terpendek di dunia Dinas Pariwisata, 2005 dalam (Ilham, 2012, p. 2).

Survei dinas kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Kolaka menunjukkan bahwa sungai ini memiliki panjang 20 m dan lebar 15 m dari dasar munculnya mata air hingga ke muara. Air sungai kelihatan berwarna hijau dan sangat jernih serta dasarnya yang terus berubah-ubah. Dengan keunikan tersebut, maka masyarakat lokal maupun non lokal sering mengadakan kunjungan ke daerah ini baik yang ingin reksiasi maupun yang ingin melakukan penelitian.

Banyak asumsi masyarakat setempat mengatakan bahwa sungai tersebut mengalami proses alam yang

berkepanjangan sehingga jalur sungai yang dulunya lurus kini membengkok akibat gelombang air laut. Akibat terjadinya sedimentasi pasir yang menyebabkan jalur sungai tersebut mengalami perubahan secara signifikan. Kawasan objek wisata alam ini juga memiliki lembah-lembah yang mengandung batu marmer dengan udara yang sejuk sehingga pengunjung merasa nyaman berada di obyek wisata Tamborasi. Di samping itu banyak hewan menarik biasa hingga di pepohonan obyek wisata alam ini seperti monyet bulu emas, ular daun, kelelawar hutan maupun burung laut yang menjadikan obyek wisata sungai menarik.

KAJIAN PUSTAKA

Peran (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (*status*), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya (Soerjono, 2009, p. 212) sedangkan Dougherty dan Pritchard dalam (Bauer, 2003, p. 56) mengemukakan bahwa relevansi suatu peran akan bergantung pada penekanan peran tersebut oleh para peneliti dan pengamat (biasanya supervisor) dan kepala sekolah) terhadap produk atau outcome yang dihasilkan. Dalam hal ini, strategi dan struktur organisasi juga

terbukti mempengaruhi peran dan persepsi peran atau *role perception*.

Dalam memenuhi kebutuhan dasar dari manusia perlu bekerja sama dengan kelompok dan bagi kebutuhan sekunder maka diperlukan untuk berkomunikasi menurut makna yang disepakati bersama dan institusi sosial yang berlaku sebagai kontrol dalam aktivitas dan mengembangkan masyarakat.

Timbulnya kebutuhan dasar dan sekunder tersebut maka terbentuk pula institusi sosial yang dapat memberikan pedoman melakukan kontrol dan mempersatukan (integrasi) anggota masyarakat (Malinowski) dalam (Garna, 1996, p. 55). Untuk membentuk institusi-institusi tersebut, masyarakat membuat kesepakatan atau perjanjian diantara mereka yang menurut Rosseau terjemahan (Sumardjo, 1986, p. 15) adalah konflik kontrak sosial (*social contract*). Adanya kontrak sosial tersebut selanjutnya melahirkan kekuasaan dan institusi pemerintahan yakni sebagai berikut.

1. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

Konsep fasilitas dan fasilitator sudah ada sejak jaman purba. Sejarah telah mencatat adanya peran-peran serupa di jaman nenek moyang kita. Minat terhadap fasilitas akhir-akhir ini sesungguhnya mengajak kita kembali ke akar dengan cara memberikan apresiasi pada nilai-nilai dan proses-proses yang terjadi pada masa lalu.

a. Peran dan Fungsi Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembatani kepentingan berbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah). Sebagai fasilitator, pemerintah berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman, termasuk memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan.

b. Nilai-nilai penting dalam memfasilitasi

1. Demokrasi

Setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk ikut ambil bagian dalam proses dimana dia menjadi peserta yanpa prasangka; perencanaan untuk pertemuan apa saja terbuka luas dan dilakukan secara bersama-sama oleh fasilitator dan para peserta; agenda dirancang untuk memenuhi kebutuhan para peserta dan terbuka terhadap perubahan-perubahan para peserta.

2. Tanggung Jawab

Sebagai fasilitator, bertanggung jawab terhadap rencana yang sudah dibuat, apa saja yang dilakukan dan bagaimana hal ini membawah pengaruh pada isi partisipasi dan proses pada pembahasan itu.

3. Kerja sama

Fasilitator dan para peserta bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama mereka. Orang mungkin akan mengatakan bahwa kepemimpinan adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang terhadap sebuah kelompok.

4. Kejujuran

Fasilitator mewakili secara jujur nilai-nilai dirinya sendiri, perasaan, keperhatinan dan prioritas dalam bekerja bersama seluruh peserta pelatihan, dan fasilitator seharusnya menentukan suasana bagi suatu harapan akan kejujuran dari seluruh peserta.

5. Kesamaan Derajat

Setiap anggota mempunyai sesuatu yang dapat disumbangkan pada peserta pelatihan dan perlu diberikan kesempatan yang adil untuk melakukan hal itu. Fasilitator meyakini bahwa dia dapat belajar dari para peserta sebesar apa yang mereka bisa pelajari dari fasilitator.

2. Peran pemerintah sebagai Motivator.

Peran pemerintah sebagai Motivator adalah bagian dari agen perubahan. Dengan cara memberikan motivasi, para motivator selalu berusaha memberikan sesuatu yang terbaik bagi siapa saja untuk bisa merubah keadaan hidupnya menjadi lebih baik. Tentu hal ini bukan pekerjaan yang mudah, karena ada beberapa tugas penting yang harus dilakukan. Diantara tugas-tugas penting tersebut minimal ada empat tugas yang dilakukan oleh para motivator.

3. Peran pemerintah sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai Regulator merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan atau kebijakan mengenai regulasi. A

- a. Mengupayakan efisiensi dan peningkatan layanan.
- b. Menetapkan standar kinerja.
- c. Memberi insentif untuk meningkatkan O&M.
- d. Memberi penghargaan untuk manajer yang baik.
- e. Memberi sanksi untuk kinerja yang jelek.
- f. Memajukan hubungan yang responsif kepada kebutuhan langganan.
- g. Menjaga kelangsungan dan perluasan layanan dengan peningkatan kinerja dan;
- h. Menjamin pengembalian biaya.

Regulasi adalah mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat berbagai bentuk, misalnya: pembatasan hukum diumumkan oleh otoritas pemerintah, regulasi pengaturan diri oleh suatu industri seperti melalui asosiasi perdagangan, Regulasi sosial misalnya; norma, co-regulasi dan pasar.

Regulasi dapat dilihat sebagai artefak laporan pelaksanaan kebijakan. Contoh umum regulasi mencakup kontrol di masukan pasar, harga, upah, persetujuan pembangunan, efek polusi, pekerjaan bagi orang-orang tertentu dalam industri tertentu, standar produksi untuk barang-barang tertentu, pasukan militer dan jasa.

Merton dalam (Raho, 2007, p. 67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai

perangkat peran. Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status sosial.

Tamborasi makin unik, meskipun obyek wisata pada Sungai Tamborasi memiliki banyak keunikan alamiah, namun fasilitas umum seperti tempat sampah dan toilet umum kurang memadai. Selain sampah dan limbah anorganik berserakan dimana-mana. Hal ini yang menjadi tolak ukur pengelolaan kawasan wisata kurang efektif disebabkan kurangnya Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Objek Wisata tersebut. Oleh karena itu diperlukan penyediaan fasilitas umum tersebut dan upaya penyadaran masyarakat melalui berbagai kegiatan pelestarian lingkungan wisata alam Tamborasi guna mempertahankan kelestarian kawasan ini.

Peran pemerintah dalam pengelolaan objek wisata di Sungai Tamborasi Kabupaten Kolaka dilihat dari proses pengelolaannya dapat diketahui belum maksimal karena dimana masih banyaknya sarana dan prasarana dalam obyek wisata tersebut belum ada bahkan banyak yang tidak layak pakai, sehingga hal tersebut diketahui bahwa peranan pemerintah dalam mengembangkan objek wisata di sungai Tamborasi masih belum baik karena pemerintah kurang koordinasi serta pengawasan untuk menjalin kerja sama dengan masyarakat serta pihak pengelola

objek wisata dalam pengembangan fasilitas pengelolaan objek wisata di Sungai Tamborasi Kabupaten Kolaka, sehingga hal tersebut merupakan hambatan dan tugas pemerintah dalam mengembangkan destinasi pariwisata serta dapat menjadi pusat objek wisata yang dapat meningkatkan perekonomian dan budaya Kabupaten Kolaka baik secara lokal maupun secara internasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan dari Oktober sampai November Tahun 2017 berlokasi di wilayah Desa Tamborasi Kecamatan Iwoimenda Kabupaten Kolaka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian Studi Kasus. Metode penelitian ini dipilih untuk mendeskripsikan secara kongkret permasalahan dengan pertimbangan bahwa pengelolaan objek wisata Sungai Tamborasi kurang efektif sehingga penelitian ini mengetahui tentang peran pemerintah dalam pengelolaan objek wisata di Desa Tamborasi Kecamatan Iwoimenda Kabupaten Kolaka. Teknik penentuan Informan dalam penelitian ini dilakukan secara purposive sampling yaitu dengan melihat kesesuaian antara calon informan dengan informan yang dibutuhkan, (Sugiyono, 2012, p. 91). Artinya, informasi yang dipilih adalah mereka yang betul-betul memiliki kompetensi untuk menjelaskan tentang Peran Pemerintah dalam pengelolaan

objek wisat yang nantinya dapat diidentifikasi. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan melalui observasi, interview, studi kepustakaan dan dokumentasi.

Sedangkan teknik analisis data menggunakan model (Miles M.B et al., 2014, p. 31), analisis data dilakukan dengan Data Collection, Data Condensation, Data Display dan Conclusion Drawing/Verification.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kolaka adalah salah satu unsur pemerintah yang berfungsi untuk menyelenggarakan urusan wajib kebudayaan dan pilihan pariwisata. Seiring dengan era otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi daerah yang dimilikinya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat UUD 1945, yang diimplementasikan dalam Visi Kabupaten Kolaka Tahun 2009 - 2014 yaitu “ Mewujudkan Kolaka Emas 2014”. Atas dasar visi tersebut di atas maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kolaka sebagai instansi teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata akan menyelenggarakan prioritas pembangunan di bidang kebudayaan dan pariwisata. Penelitian ini berlokasi di wilayah Desa Tamborasi Kecamatan Iwoimenda Kabupaten Kolaka dimana peneliti ingin mengetahui tentang

peran pemerintah dalam pengelolaan objek wisata di Desa Tamborasi Kecamatan Iwoimenda Kabupaten Kolaka. Desa Tamborasi merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Kolaka yang memiliki obyek wisata. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan pemegang kebijakan dalam pengelolaan obyek wisata. Lokasi Sungai Tamborasi merupakan sungai paling pendek di Indonesia, bahkan salah satu yang terpendek di Dunia. Sungai langsung berhubungan dengan laut, dari mata air tempat hulu sungai berasal, menuju ke hilir dimana sungai tersebut mengalir sampai ke laut dan hanya berjarak tak lebih dari 20 meter saja, sedangkan untuk lebar sungai ini adalah 15 meter.

Sungai ini sekilas menyerupai genangan air yang tertutup oleh bentangan pasir. Namun, air yang di dalamnya bukanlah air limpasan dari laut dan banjir, melainkan dari mata air yang mengalir. Dengan demikian, Tamborasi disebut sebagai sungai, karena air dari mata air tersebut menggali hingga ke laut. Sungai tersebut dikelilingi oleh pemandangan yang indah yang terdiri dari pepohonan di sekeliling Sungai, dan hamparan pasir putih sepanjang pantai sekitar sungai.

A. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

Pemerintah sebagai fasilitator hendaknya memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk mengambil peran dalam melaksanakan program

sesuai dengan kemampuan dalam kemandirian serta pengambilan keputusan.

Salah satu indikator keberhasilan dari kegiatan fasilitasi yaitu menumbuhkan kemandirian masyarakat. Keputusan sepenuhnya di tangan masyarakat sendiri yang sebagai perencana, pelaksana, pengawas dan evaluator. Fasilitasi harus mampu mengurangi bentuk intervensi yang tidak perlu yang dapat menghambat kemandirian masyarakat, sehingga masyarakat benar-benar tahu dan ikut menentukan jenis kebijakan yang dianggap tepat tentang dirinya sendiri dalam membangun objek pariwisata.

Pemerintah merupakan fasilitator yang harus mampu menyediakan anggaran untuk dapat membangun fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh pengelola objek wisata, penyediaan anggaran merupakan langkah yang harus ditempuh oleh pemerintah dalam membangun objek wisata yang lebih baik agar menjadi pendapatan daerah untuk menutupi hal yang lain. Hasil wawancara dengan Bapak A.G mengatakan bahwa:

“Bahwa kami selama ini selalu menyediakan anggaran pembangunan objek wisata kepada pihak pengelola secara bertahap untuk memperbaiki dan membangun fasilitas yang dibutuhkan” (wawancara, A.G tanggal 25 Oktober 2017)

Pendapat di atas dapat dianalisis bahwa langkah pemerintah yang dilakukan terkait dengan pemberian dan pengadaan anggaran pembangunan

objek wisata di sungai Tamborasi sudah ada dan sudah diberikan kepada pihak pengelola objek wisata untuk digunakan dalam membangun objek wisata. Status aksesibilitas objek wisata Sungai Tamborasi Kecamatan Iwoimenda Kabupaten Kolaka mudah dan terjangkau, kualitas jalan menuju objek wisata baik, serta modal transportasi dan kemudahan pencapaian jarak kendaraan umum dari Kota Kolaka ke Tamborasi cukup lancar sehingga jarak tempuh menuju ke objek wisata sangat cepat dengan menempuh waktu sekitar 120 menit. Hasil wawancara dengan Ibu H.R dapat diketahui sebagai berikut:

“Bahwa menurut saya jalanan yang menuju ke tempat wisata Sungai Tamborasi sudah baik dan sangat mudah dijangkau oleh wisatawan, kemudian dari segi prasarana juga sudah agak baik juga (wawancara H.R tanggal 29 Oktober 2017)

Dari hasil wawancara di atas dapat dianalisis bahwa kondisi infrastruktur jalan menuju objek wisata sudah memadai dan baik serta arus transportasi sudah baik juga. Transportasi atau transport (Adji Adisasmita, 2011, p. 7) diartikan sebagai tindakan atau kegiatan mengangkat atau memindahkan muatan (barang dan orang) dari suatu tempat ke tempat tujuan atau dari tempat asal ke tempat tujuan. Sedangkan (Mulyono, 2008, p. 153) layanan transportasi adalah memindahkan barang atau manusia dari satu tempat ke tempat lain sehingga memperoleh manfaat. Transportasi juga dapat diartikan

sebagai usaha untuk memindahkan, menggerakkan, mengangkut, dan menghajikan suatu obyek dari suatu tempat lain.

Obyek tersebut lebih bermanfaat atau dapat digunakan untuk tujuan tertentu. Melalui kerjasama antara Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dan Kementerian Komunikasi dan Informasi, promosi potensi wisata Indonesia dapat disebarkan kepada masyarakat luas baik secara nasional maupun internasional, oleh karena itu kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sangat memungkinkan untuk digunakan sebagai sarana promosi peristiwa Indonesia ke seluruh dunia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu H.R dapat diketahui sebagai berikut:

“Bahwa selama ini kami selalu menyebarkan informasi baik itu melalui media, internet serta informasi secara langsung kepada masyarakat untuk memperkenalkan objek wisata Sungai Tamborasi” (wawancara H.R tanggal 29 Oktober 2017)

Dari hasil wawancara dengan Ibu H.R dapat dianalisis bahwa seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, kebutuhan untuk berliburpun semakin meningkat sehingga diperlukan suatu informasi tentang tujuan wisata, obyek wisata yang menarik, sarana yang tersedia seperti transportasi, produk wisata dan sebagainya, namun demikian seringkali wisatawan atau

calon wisatawan baik lokal maupun mancanegara mengalami kesulitan untuk memperoleh informasi tersebut karena tidak mengetahui dimana dan dari siapa informasi bisa didapatkan. Oleh karena itu informasi dibidang pariwisata perlu disiapkan dengan baik dan terstruktur agar publik dapat mengakses dengan mudah.

B. Peran pemerintah Sebagai Motivator

Peran pemerintah sebagai Motivator adalah bagian dari agen perubahan dengan cara memberikan motivasi, para motivator selalu berusaha memberikan sesuatu yang terbaik bagi siapa saja untuk bisa merubah keadaan hidupnya menjadi lebih baik. Tentu hal ini bukan pekerjaan yang mudah, karena ada beberapa tugas penting yang harus dilakukan. Diantara tugas-tugas penting tersebut minimal ada empat tugas yang dilakukan oleh para motivator.

1. Memberikan Motivasi

Pemerintah merupakan mitra yang sangat penting dalam proses meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya serta merupakan pihak yang mampu mengembangkan usaha yang dapat meningkatkan pendapatan daerahnya seperti adanya objek wisata, sehingga hal tersebut peran pemerintah sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat agar bagaimana memberikan dorongan atau motivasi supaya tercipta kerja sama yang baik untuk mengelolah obyek wisata yang ada di daerahnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan

Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata A.G dapat diketahui sebagai berikut:

“Bahwa untuk mengetahui peran pemerintah sebagai motivator maka kita harus tahu dulu tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yaitu membantu pemerintah kabupaten secara teknis dan berperan sebagai pembuat regulasi, pengawasan dan pelaksana, jadi pemerintah dalam hal ini dinas perannya sebagai motivator adalah melaksanakan instruksi dari bupati untuk bagaimana memberikan pengarahan kepada masyarakat dalam mengelola obyek wisata dengan baik”.(wawancara bapak A.G 25 Oktober 2017)

Dari hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa peran pemerintah sebagai motivator dalam pengelolaan objek wisata Sungai Tamborasi dapat diketahui bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam hal ini selalu mengarahkan Pemerintah Kecamatan sampai ke Pemerintah Desa bagaimana berperan sebagai motivator dengan memberi motivasi kepada masyarakat serta memberikan dorongan agar bagaimana masyarakat sadar bahwa betapa pentingnya wisata Sungai Tamborasi dikelola dengan baik untuk meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak S.R sebagai berikut:

“Peran pemerintah sebagai motivator disini bahwa saya sering memberikan motivasi kepada

masyarakat dan pengunjung agar bagaimana menjaga kelestarian objek wisata dengan baik, agar dapat mendongkrak tingkat perekonomian daerah dan masyarakat pada umumnya”.(wawancara dengan bapak S.R 29 Oktober 2017)

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pemerintah sangat berperan dalam memberikan motivasi kepada masyarakat serta mendorong masyarakat agar bagaimana menjaga kelestarian objek wisata untuk menarik perhatian dari wisatawan dari luar agar dapat mendongkrak tingkat pendapatan daerah serta perekonomian masyarakat.

1. Memberikan Pendidikan dan Pelatihan Kepada Pengelola Objek Wisata dan Masyarakat

Kesuksesan dalam pembangunan pariwisata diperlukan pemahaman yang baik selaku motivator. Pemerintah tentu harus memperhatikan dan memastikan bahwa pembangunan pariwisata itu akan mampu memberikan keuntungan sekaligus menekan biaya sosial ekonomi serta dampak lingkungan sekecil mungkin. Pemerintah membangun dan memfasilitasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan menjamin pendidikan dan pelatihan yang profesional untuk menyuplai kebutuhan tenaga kerja disektor pariwisata. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak A.M dapat diketahui sebagai berikut :

“bahwa pemerintah dalam memberikan pelatihan dan

pendidikan kepada pengelola dan masyarakat selama ini belum ada kami rasakan apalagi mengenai pelatihan dan pendidikan objek wisata” (wawancara bapak A.M 20 November 2017).

Dari hasil wawancara di atas dapat dianalisis bahwa dalam meningkatkan sumber daya manusia pengelola objek wisata dan masyarakat belum baik dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata belum memberikan pelatihan serta pendidikan kepada pengelolaan objek wisata dan masyarakat pada umumnya yang ada di daerah tersebut. Seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak K.S dapat diketahui sebagai berikut :

“memang kalau saya lihat selama ini pemerintah tidak pernah terjun langsung ke lapangan bagaimana memberikan pelatihan serta motivasi kepada pengelola dan masyarakat sehingga pengelolaan tidak efektif”. (wawancara bapak K.S tanggal 23 November 2017).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan objek wisata Sungai Tamborasi berjalan tidak efektif disebabkan karena tidak adanya motivasi pemerintah daerah kepada pengelola objek wisata dan masyarakat seperti tidak adanya pelatihan dan pemberian pendidikan mengenai tata cara pengelolaan objek wisata, sehingga sumber daya manusia tidak meningkat dengan baik. Hasil observasi di lapangan bahwa peningkatan sumber daya manusia yang ada di masyarakat belum baik karena tidak adanya keterlibatan pemerintah dalam hal ini Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata dalam pengelolaan objek wisata.

C. Peran Pemerintah sebagai Regulator

Peran pemerintah yang paling terasa tentu saja dibidang pembuatan kebijakan yang mempengaruhi dunia usaha secara keseluruhan, seperti kebijakan moneter/fiskal, perpajakan, tenaga kerj atau kemudahan persyaratan pendiri usaha baru dan kebijakan yang berpengaruh terhadap industri tertentu. Melalui regulasi atau deregulasi pemerintah, peta persaingan bisa berubah dalam sekejap. Industri yang sebelumnya diproteksi tiba-tiba menjadi industri yang menjanjikan potensi persaingan sangat keras.

1. Penyusunan Kebijakan

Kebijakan yang disusun mungkin akan berdampak langsung maupun tidak langsung dengan pariwisata. Kebijakan ini akan menjadi tuntunan bagi pelaku pariwisata dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan pariwisata. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak L.M sebagai berikut :

“Bahwa langkah yang paling baik untuk dilakukan pemerintah dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ke depan adalah bagaimana membuat aturan yang bagus untuk dapat diterapkan dalam pengelolaan objek wisata, sehingga dapat menjadi pegangan dalam pengelolaan objek wisata ke depannya lebih baik”(wawancara bapak L.M 28 Oktober 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dianalisis bahwa untuk meningkatkan pengelolaan objek wisata Sungai Tamborasi pemerintah

dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata harus mampu membuat regulasi atau kebijakan yang dapat menjadi peraturan yang menjadi patokan dalam meningkatkan wisata Sungai Tamborasi, seperti membuat regulasi mengenai perda pengelolaan objek wisata, Perda Tentang Retribusi, dan Perda yang mengatur tata Kelola Objek wisata yang baik, dari hal ini sehingga untuk meningkatkan pengelolaan objek wisata maka perlu adanya aturan yang kuat agar masyarakat secara tidak langsung akan mematuhi aturan tersebut. Jadi kesimpulan yang dapat diambil adalah pemerintah daerah harus mampu menciptakan peraturan yang jelas dan terarah agar masyarakat dapat memahami hal tersebut untuk bekerja sama dalam mengelolah objek wisata dengan baik.

1. Landasan Kerja yang Jelas dan Kewenangan Hukum

Regulasi merupakan suatu usaha dari instansi misalnya pemerintah yang telah diberi wewenang atau otoritas untuk mengatur aktivitas tertentu yang berada di wilayah yuridiksinya. Hal ini berarti pemerintah memberlakukan aturan tertentu yang mendikte aktivitas lain, dalam kaitannya dengan pariwisata regulasi merupakan alat bagi pemerintah dalam koridor kebijakan pariwisata yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak A.B dapat diketahui sebagai beriku:

“bahwa pemerintah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

dalam membuat regulasi tidak jelas alur yang diberikan kepada pemerintah kecamatan sehingga dalam hal pengelolaan objek wisata tidak terkelola dengan baik, karena tidak ada kejelasan untuk diberikan kewenangan untuk mengelola wisata Sungai Tamborasi". (wawancara bapak A.B tanggal 26 Oktober 2017)

Dari hasil wawancara di atas dengan bapak A.B dapat dianalisis bahwa pemerintah sebagai regulator dalam hal ini belum terlalu menonjol karena tidak jelas regulasi atau kebijakan yang dibuat untuk diberikan kewenangan kepada pemerintah kecamatan terkait dengan pengelolaan objek wisata Sungai Tamborasi tersebut, sehingga pemerintah daerah sebagai regulator belum maksimal karena pemerintah belum bisa menciptakan kebijakan atau regulasi yang terkait dengan pengelolaan objek wisata.

2. Menetapkan Standar Kinerja

Sangat penting untuk menetapkan apa yang diharapkan dalam perencanaan dalam kerangka pencapaian target jangka panjang, Target ditetapkan setelah pengembangan dan evaluasi program yang ditetapkan sebelumnya. Jika target cuma diberikan kepada pengelola tanpa ada penetapan standar kinerja maka akan menimbulkan dampak untuk meningkatkan motivasi kinerja pengelola objek wisata tersebut. Sementara itu penetapan standar kinerja pemerintah akan menjadi

tuntunan bagi pengelola objek wisata, masyarakat dan pemerintah dalam pencapaian misi dalam pariwisata. Sehingga Penetapan standar kinerja tersebut berfungsi sebagai konfirmasi mengenai target dan tujuan wisata Sungai Tamborasi dari sudut pandang wisatawan yang berkunjung. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak S.S dapat diketahui sebagai berikut:

"Bahwa selama ini saya mengelola objek pariwisata ini kami selalu merasa kebingungan dan tidak tahu apa sebenarnya posisi dan hal apa yang harus di kerja agar pengelolaan objek wisata ini jalan dengan baik". (wawancara S.S tanggal 14 November 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak S.S dapat dianalisis bahwa dalam proses pengelolaan objek wisata Sungai Tamborasi pihak pengelola yang terlibat di sini merasa kebingungan untuk mengelola objek wisata, dan tidak adanya standar kerja yang jelas dari pemerintah dalam hal ini dinas kebudayaan dan pariwisata, sehingga dari hal itu pengelolaan objek wisata terhambat karena pengelola objek wisata kebingungan.

D. Langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah daerah dalam Pengelolaan Objek Wisata Sungai Tamborasi

1. Perencanaan Pengelolaan Objek Wisata

Dengan perencanaan dapat dibuat pengalokasian sumber daya yang paling baik. Alternatif dapat dibuat,

agar sumber digunakan dengan sebaik-baiknya. Perencanaan merupakan alat ukur dari pada kemajuan ekonomi dan juga alat pengawasan daripada pelaksanaan pembangunan. Melalui perencanaan dapat dibuat perkiraan keadaan dimasa yang akan datang.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak A.G dapat diketahui sebagai berikut :

“dalam perencanaan yang kami akan lakukan dalam pengelolaan objek wisata ke depan kami sudah konsep dan akan kami terapkan kepada pihak yang akan mengelola objek wisata tersebut namun kami masih menunggu keputusan yang jelas dari pemerintah Kabupaten”.(wawancara Bapak A.G tanggal 25 Oktober 2017)

Seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak S.L dapat diketahui sebagai berikut :

“bahwa memang Dinas Pariwisata sudah menyampaikan mengenai perencanaan pengelolaan objek wisata Sungai Tamborasi namun sampai sekarang belum juga dilaksanakan, mungkin sementara menunggu keputusan dari pemerintah Kabupaten” (wawancara Bapak S.L Tanggal 30 Oktober 2017).

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan pengelolaan objek wisata Sungai Tamborasi sudah ada namun dalam tahap pengelolaan yang akan dilakukan belum dilaksanakan karena

terkait dengan keputusan pemerintah. Berdasarkan hasil di lapangan dapat diketahui bahwa perencanaan pengelolaan objek wisata yang akan dilakukan oleh dinas Pariwisata sudah terencana dengan baik seperti pembangunan infrastruktur jalan menuju tempat wisata serta perencanaan pembangunan fasilitas objek wisata.

2. Penganggaran Pengelolaan Objek Wisata.

Penganggaran adalah suatu proses menyusun rencana keuangan, yaitu pendapatan dan pembiayaan, kemudian mengalokasikan ke masing-masing kegiatan. Penganggaran juga merupakan komitmen resmi manajemen yang terkait dengan harapan manajemen tentang pendapatan, biaya dan beragam transaksi keuangan dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Penyusunan anggaran usaha akan lebih banyak berhasil apabila ditunjang oleh kebijaksanaan-kebijaksanaan yang terarah dan dibantu oleh perencanaan-perencanaan yang matang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu H.R dapat diketahui sebagai berikut:

“Berbicara mengenai anggaran pengelolaan objek wisata Sungai Tamborasi 3 Tahun terakhir sebanyak 500 juta kami sudah berikan kepada pihak pengelola objek wisata untuk melakukan pembangunan objek wisata” (wawancara Ibu H.R tanggal 29 Oktober 2017)

Seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak B.D dapat diketahui sebagai berikut:

“Pemberian anggaran yang diberikan kepada kami sebagai pengelola sudah ada kami terima dan kami sudah gunakan untuk membangun fasilitas yang dibutuhkan”“(wawancara Bapak B.D tanggal 10 November 2017)

Dari hasil wawancara di atas dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa anggaran yang diberikan pemerintah kepada pihak pengelola sudah diberikan dan sudah digunakan untuk pembangunan objek wisata di Sungai Tamborasi Kabupaten Kolaka, dan hasil observasi di lapangan dapat saya katakan bahwa anggaran pengelolaan objek wisata tahun 2013 sebanyak Rp. 500 juta akan tetapi proses pencairan dana itu secara bertahap dan ketika anggaran sudah dicairkan kepada pihak pengelola tersebut tidak sesuai dengan bukti fisik yang terjadi di lapangan mengenai pengelolaan objek wisata, karena hal ini pemerintah daerah dapat disimpulkan bahwa pengelolaan objek wisata belum maksimal karena kurangnya koordinasi dan pengawasan kepada pihak pengelola objek wisata Sungai Tamborasi Kabupaten Kolaka.

3. Implementasi Pengelolaan Anggaran Pembangunan Objek Wisata.

Perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan

Pengelola Objek Wisata Sungai Tamborasi sudah terlaksana meskipun masih memiliki hambatan-hambatan untuk mencapai hal tersebut, sehingga dalam proses perencanaan yang dilakukan sebelumnya akan tercapai bila ada kerja sama yang baik dengan pihak pengelola dan masyarakat untuk bersama-sama mengawal agenda yang telah direncanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Pencapaian perencanaan pengelolaan objek wisata perlu adanya anggaran yang jelas dalam mencapai hal yang telah direncanakan bersama dari masyarakat agar proses pengelolaan objek wisata Sungai Tamborasi berjalan dengan baik, namun hal itu tidak akan terlepas dari pengawasan Pemerintah Kabupaten agar proses pengelolaan tidak terhambat dan sesuai dengan rencana yang telah diatur sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak L.K dapat diketahui sebagai berikut:

“Bahwa pelaksanaan pengelolaan objek wisata Sungai Tamborasi tidak berjalan dengan baik karena terkendala dengan anggaran pengelolaan dan rencana yang akan dilakukan biasanya tidak sesuai dengan harapan yang kami ajukan sebelumnya” (wawancara Bapak L.K tanggal 30 Oktober 2017)

Dari hasil pendapat di atas dapat dianalisis bahwa perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak sesuai dengan realitas yang terjadi di

lapangan dalam proses pengelolaan objek wisata, sehingga implementasi dalam pengelolaan objek wisata Sungai Tamborasi tidak berjalan dengan baik, hal ini disebabkan karena tidak adanya kerja sama antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan pihak pengelola objek wisata sehingga proses pengelolaan objek wisata terhambat.

Seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak M.P dapat diketahui sebagai berikut:

“Memang perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sudah ada namun pelaksanaannya biasa tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan, ini disebabkan karena pemerintah tidak mengawasi proses pengelolaan objek wisata” (wawancara dengan Bapak M.P tanggal 27 Oktober 2017)

Dari hasil wawancara di atas dapat dianalisis bahwa dalam proses implementasi atau pelaksanaan yang telah direncanakan sebelumnya oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak sesuai yang terjadi di lapangan, hal ini disebabkan karena pemerintah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak melakukan evaluasi terhadap pengelolaan objek wisata, sehingga kekurangan yang terjadi dalam pengelolaan pembangunan objek wisata tidak tercapai sesuai dengan harapan masyarakat untuk dapat meningkatkan pembangunan objek wisata.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peran pemerintah dalam pengelolaan objek wisata Sungai Tamborasi Kabupaten Kolaka dapat diketahui bahwa peran pemerintah daerah sebagai fasilitator, motivator, dan regulator belum maksimal dan kurang efektif. Hal tersebut diketahui karena kurangnya koordinasi dan pengawasan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terhadap pengelola objek wisata dan masyarakat.

Langkah-langkah pemerintah dalam mengelola objek wisata Sungai Tamborasi terdapat tiga indikator yaitu Perencanaan Pengelolaan Objek Wisata, Penganggaran Pengelolaan Objek Wisata, Implementasi Pengelolaan Anggaran Objek Wisata. Karena dunia pariwisata merupakan salah satu sektor penghasil devisa yang memiliki potensi cukup besar untuk dikembangkan dan dikelola dengan baik akan memberikan sumbangan yang besar terhadap keuangan Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji Adisasmata, S. (2011). *Jaringan Transportasi (Teori dan Aplikasi)*. Graha Ilmu.
- Bauer, J. . (2003). *Comparison of Attitudes in Germany and the United States*.
- BPS. (2016). *No Title*.
- Garna, J. . (1996). *Ilmu-Ilmu Sosial:*

Dasar-Konsep-Posisi. Bandung:
Program Pascasarjana Universitas
Padjadjaran.

Ilham. (2012). *Ilham* (2012:2).

Miles M.B, Huberman A.M, & Saldana
J. (2014). *Qualitative Data
Analysis, A Methods Sourcebook,
Edition 3. USA: Sage
Publications.* Terjemahan
TjetjepRohiniRohidi, UI-Press.

Mulyono, S. (2008). *Manajemen Kota
dan Wilayah : Realita &
Tantangan.* Bumi Aksara.

Raho, B. (2007). *Teori Sosiologi
Modern.* Prestasi Pustakaraya.

Soerjono, S. (2009). *Sosiologi Suatu
Pengantar Edisi Baru.* Rajawali
Pers.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D.*
CV Alfabeta.

Sumardjo. (1986). *Apresiasi
Kesusastraan.* Jakarta:
PT.Gramedia.

Yoeti, O. A. (2008). *Perencanaan dan
Pengembangan Pariwisata.*
Pradnya Paramita.